

**KONSEP AMAR MA'RÛF NAHÎ MUNKAR FRONT PEMBELA ISLAM
DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Hukum Siyasah
Syar'iyah**

Oleh :

Ramada Hendrian

NPM : 1621020574

Jurusan : Siyasah Syar'iyah



FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN SIYASAH SYAR'IYYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2019/2020

**KONSEP AMAR MA'RÛF NAHÎ MUNKAR FRONT PEMBELA ISLAM
DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Hukum Siyasah
Syar'iyyah

Oleh:

Ramada Hendrian

NPM: 1621020574

Jurusan: Siyasah Syar'iyyah

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN SIYASAH SYAR'IYYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2019/2020

ABSTRAK

Fenomena gerakan kelompok Islamisme seringkali menegakkan dakwah Islamiyyah melalui cara konfrontatif, seperti Front Pembela Islam. FPI mengenal dua metode dalam penegakan dakwah Islamiyyah, yaitu *amar ma'rûf* menggunakan metode lembut, seperti membuka Majelis Ta'lim. Sedangkan penegakan *nahî munkar* menggunakan metode tegas. Hal ini dapat ditilik dari aksi *sweeping* yang dilakukan oleh FPI terhadap tempat-tempat maksiat di tengah masyarakat. Padahal inisiatif berperkara sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga gerakan tersebut mendapat perlawanan dari para pengaman tempat maksiat atau bahkan masyarakat sekitar. Alhasil, terjadi kerusuhan yang menimbulkan kerugian dan korban yang telah mencederai kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, yaitu mengapa kelompok FPI melakukan aksi *sweeping* dalam menegakkan konsep *amar ma'rûf nahî munkar*, dan bagaimana konsep *amar ma'rûf nahî munkar* yang menggunakan unsur kekerasan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara komprehensif aksi *sweeping* yang dilakukan oleh FPI dan penegakan *amar ma'rûf nahî munkar* yang berujung pada kekerasan dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kerangka berpikir deskriptif analisis dengan pendekatan induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui teori demokrasi konstitusional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur terkait beserta data-data pendukung yang diperoleh dari jurnal, e-book, karya ilmiah, maupun artikel terkait yang terpercaya dan autentik. Kemudian data-data tersebut difilter, dikaji, dianalisis, dan dipahami sesuai tema bahasan untuk memperoleh data-data valid dan kompatibel, selanjutnya ditulis secara sistematis dalam bab-bab skripsi ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) FPI hanya menegakkan kewajiban umat Islam dalam dakwah *amar ma'rûf nahî munkar* yang terwujud sebagai gerakan anti-maksiat. Hal ini bermaksud untuk menegakkan dakwah Islamiyyah dan mengkritisi lemahnya kontrol pemerintah dalam menegakkan hukum. (2) Penegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* dalam kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia perlu memperhatikan kemaslahatan dalam koridor syari'at Islam dan kepatuhan kepada pemimpin sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Telaah Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15

BAB II DEMOKRASI ISLAM DAN INDONESIA

A. Demokrasi dalam Islam	21
B. Demokrasi di Indonesia	28
C. Konsep <i>Amar Ma'rûf Nahî Munkar</i> dalam Islam	41
D. Hukum di Indonesia.....	53

BAB III EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI DAKWAH FPI

A. Sejarah Munculnya FPI di Indonesia.....	68
B. Visi dan Misi Front Pembela Islam	80
C. Struktur dan Cabang-Cabang Organisasi Front Pembela Islam.....	81
D. Pandangan Front Pembela Islam Terhadap Konsep <i>Amar Ma'rûf Nahî Munkar</i>	89
E. Praktik Pergerakan Front Pembela Islam dalam Mengaplikasikan Konsep <i>Amar Ma'rûf Nahî Munkar</i>	92
F. Dampak Praktik <i>Amar Ma'rûf Nahî Munkar</i> FPI Terhadap Kehidupan Demokrasi di Indonesia.....	99

BAB IV RELEVANSI AMAR MA'RÛF NAHÎ MUNKAR DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Analisis terhadap Aksi <i>Sweeping</i> yang Dilakukan oleh	
---	--

FPI dalam Menegakkan Konsep <i>Amar Ma'rûf Nahî</i> <i>Munkar</i>	107
B. Analisis Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Konsep <i>Amar Ma'rûf Nahî Munkar</i> yang Memakai Unsur Kekerasan dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia	114
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	124
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan. Hal ini adalah untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini ialah **Konsep *Amar Ma'rûf Nahî Munkar* Front Pembela Islam Dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia**. Kemudian uraian dari istilah-istilah judul ialah sebagai berikut:

1. Konsep merupakan “rancangan.”¹
2. *Amar Ma'rûf Nahî Munkar* Front Pembela Islam merupakan “sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Dalam penegakkannya, ada sebuah Teori Kesan yang berbunyi, implementasi dakwah *amar ma'rûf nahî munkar* harus diwujudkan seoptimal mungkin, namun pada suatu kondisi yang menuntut ketegasan, maka harus ditegakkan tanpa ragu maupun bimbang.”²

¹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2017), h.262.

²Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab (Habib Rizieq), *Dialog FPI Amar Ma'rûf Nahî Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008), h.387.

3. Front Pembela Islam (FPI) adalah “sebuah organisasi massa di Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1998. Dengan arti kata Front mengacu pada makna Terdepan, arti kata Pembela mengacu pada makna Penolong, dan arti kata Islam mengacu pada Pergerakan Yang Berlandaskan Pada Hukum Islam. Sehingga Front Pembela Islam menjadi wadah bagi pelayanan ulama kepada masyarakat.”³
4. Kehidupan adalah “cara yang dilakukan untuk tetap melangsungkan hidup.”⁴
5. Demokrasi adalah “bentuk atau sistem pemerintahan yang mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat. Demokrasi juga merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.”⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah suatu kajian terkait konsep *amar ma'rûf nahî munkar* Front Pembela Islam dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

³Andri Rosadi, *Hitam-Putih FPI: Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial* (Jakarta: Nun Publisher, 2008), h.88. Lihat juga dalam buku Habib Rizieq, *Dialog FPI...*, h.127.

⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, *KBBI Edisi Lux...*, h.168.

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h.93.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut sebagai bahan untuk penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Indonesia merupakan negara yang senantiasa melibatkan rakyatnya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara ini menganut asas demokrasi yang mana kedudukan rakyat amat penting, dan adanya berbagai proses demokrasi mengindikasikan bahwa beragamnya kapasitas peranan negara maupun peranan rakyat.
- b. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan ditelaah dalam penelitian guna mengkaji lebih dalam terkait konsep *amar ma'rûf nahî munkar* Front Pembela Islam yang dapat menimbulkan aksi menegakkan hukum sendiri melalui aksi *sweeping*, yang mana seyogianya telah bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang menganut asas hukum, sebagai akibat adanya sikap sensitifitas masyarakat terhadap penyimpangan moral dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

2. Alasan Subjektif

- a. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul mengenai konsep *amar ma'rûf nahî munkar* Front Pembela Islam dalam kehidupan demokrasi

di Indonesia dikarenakan adanya relevansi dengan program studi penulis, yaitu Siyasaah Syar'iyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Islam merupakan agama wahyu yang berintikan tauhid atau keesaan Allah swt., yang diturunkan kepada Rasulullah saw., sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁶ Bagi umat Islam, agama adalah sebuah identitas yang amat penting dan sensitif, seringkali digunakan untuk menilai diri diluar dirinya. Akibatnya, umat Islam cenderung memaksakan label kafir, sesat dan identitas buruk lainnya terhadap kaum minoritas maupun gerakan yang tidak sejalan dengan kelompoknya.⁷ Alasan ini melahirkan kelompok yang bertindak senantiasa mengatasnamakan Islam, yakni kelompok Islamisme. Kelompok Islamisme tersebut secara intens mendakwahkan ayat-ayat al-Qur'an yang dipegangi dalam rangka melegitimasi tindakan-tindakan yang cenderung anarkis.⁸

⁶Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2, (2011), (Online), h.5. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/184357-ID-konsep-al-islam-dalam-al-quran.pdf> (diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 09:00 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, *Demokrasi dan Kekecewaan* (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2009), h.34.

⁸Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an"... , h.2.

Dewasa ini, aksi dalam gerakan mobilisasi massa yang dilakukan oleh kelompok Islamisme semakin meningkat dalam menggemakan dakwah Islamiyyah. Dalam hal ini, FPI sebagai organisasi Islam yang senantiasa mengedepankan *amar ma'rûf nahî munkar*. Hal itu dilatarbelakangi oleh lahirnya FPI sebagai wadah bagi pelayanan ulama kepada masyarakat. Alasannya, bahwa para pendiri dan pejuang FPI merupakan individu-individu yang mengedepankan praktik ajaran-ajaran Islam.

Dalam gerakan dakwah *amar ma'rûf*, FPI selalu menegakkan metode lembut dengan mengajak umat untuk memperdalam ilmu agama. Hal ini dapat terlihat dari Majelis Ta'lim yang dilakukan oleh para tokoh FPI di Masjid-Masjid, seperti di Masjid al-Ishlah, Petamburan. Penegakan dakwah *amar ma'rûf*, menjadi fokus utama kehadiran FPI kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai penanaman dan peningkatan aqidah umat Islam terhadap hukum Islam. Sehingga umat Islam mampu membedakan dan tidak mencampur-adukkan hukum antara yang haq dan bathil.

Disisi lain, penegakan *nahî munkar* yang dilakukan oleh FPI menggunakan metode tegas.⁹ Sebagaimana terjadinya peristiwa penggerebekkan (*sweeping*) yang dilakukan oleh kelompok FPI dengan Laskar Pembela Islamnya pada sebuah rumah yang berada di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Aksi *sweeping* tersebut dilakukan terkait adanya dugaan praktik prostitusi

⁹Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI...*, h.26.

illegal yang ada di sebuah rumah, desa Ponteh. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa rumah tersebut ada kerumunan perempuan. Ini yang menjadi alasan kelompok FPI berdatangan untuk melakukan aksi *sweeping* dengan membawa tongkat dan bersuara lantang di lokasi tersebut. Dalam aksi *sweeping* tersebut, FPI membawa paksa dua orang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial untuk dibawa ke rumah dinas Bupati Pamekasan.

Panglima LPI Madura, Abdul Aziz Muhammad Syahid berdalih bahwa alasan *sweeping* ini dilakukan karena telah bertentangan dengan syariat Islam dan visi-misi Kabupaten Pamekasan, yang telah menjalankan syariat Islam melalui program Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam). Namun, sejumlah warga langsung membela perempuan-perempuan tersebut. Sehingga terjadi bentrok antara anggota FPI dengan warga sekitar yang tak terhindarkan. Perlawanan tersebut dipicu oleh adanya upaya paksa yang dilakukan oleh anggota-anggota FPI terhadap dua perempuan. Padahal perempuan tersebut merupakan ibu-ibu yang diundang dalam hajatan ulang tahun anak si pemilik rumah yang keberadaan rumahnya tidak jauh dari lokasi *sweeping*. Akibat bentrok tersebut, menyebabkan dua mobil dari kelompok FPI rusak dan timbulnya korban luka-luka antara kedua belah pihak, serta menimbulkan korban trauma bagi wanita dan anak-anak yang ada di sekitar lokasi bentrok.

Adapun aksi *sweeping* yang sering dilakukan FPI disaat bulan Ramadhan dengan mentertibkan para pedagang minuman keras di pinggir-pinggir jalan Kota

Jakarta.¹⁰ Namun, aksi *sweeping* tersebut selalu berhadapan dengan para preman di sekitar lokasi. Sehingga terjadi kerusuhan antara FPI dan para preman. Padahal aksi *sweeping* dilakukan sebagai bentuk untuk meminimalisir kerusakan umat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Sehingga umat Islam tidak menyia-nyiakan pelaksanaan ibadah yang penuh rahmat dan berkah Allah swt. Alasannya, FPI ingin masyarakat sadar dan berlomba-lomba untuk menggapai ridha Allah swt.

Minuman keras sudah menjadi realita sosial dalam masyarakat modern. Bagi orang yang biasa mabuk, hal ini menjadi kenikmatan tersendiri dalam hidupnya. Alasannya, minuman dapat menjadikannya tenang dan jauh dari rasa stress, frustasi maupun depresi yang dialaminya. Sehingga setiap orang yang mabuk menjadikannya sebagai pelarian untuk memperoleh ketenangan jiwa dan batinnya. Padahal dalam syari'at Islam, mabuk dapat memutus akal sehat yang bisa merusak diri sendiri. Hal ini terbukti ketika seseorang dalam keadaan mabuk sulit mengontrol pembicaraan yang tidak senonoh, keseimbangan tubuh tidak stabil, emosional yang mudah tersinggung bahkan memukul orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, FPI melakukan *sweeping* untuk menolong umat Islam dari kemunkaran tersebut.

Peristiwa di atas merupakan suatu realita sosial yang terjadi atas dasar aqidah sebagai wujud dari redistribusi nilai-nilai Islam. Tujuannya untuk

¹⁰*Ibid.*, h.26.

menanamkan aqidah dan meluruskan penyimpangan moral yang melanggar batas nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia saat ini maupun hukum Islam. Sehingga peristiwa yang alasannya berdasar pada akidah di atas, muncul dikarenakan adanya model Islam konfrontatif yang dilakukan oleh FPI.¹¹

Fenomena di atas merupakan pemahaman suatu ajaran yang berdasar pada persepsi kelompok tersebut. Penafsiran terkait ajaran gerakan anti-maksiat yang diartikan secara vertikal, menjadi sumber kekeliruan yang dipahami oleh keinginan kelompok untuk menuntaskan persoalan kemunkaran atau kemaksiatan. Akibat dominannya kesadaran penafsir, terutama dalam bentuk pra-paham, dalam proses penafsiran membuatnya cenderung lebih mudah memilih objek penafsiran yang dekat dengan problem umat Islam, tanpa memandang aturan-aturan metodelis.¹² Akibatnya menimbulkan perlawanan yang merupakan bagian dari dialektika antara realitas sosial yang dihadapi dengan nilai-nilai moral agama yang diyakini.¹³

Tindakan represif tersebut dilakukan secara sepihak tanpa menghiraukan konsensus dasar negara yang berlaku di Indonesia. Mestinya inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum (*law enforcer*), yaitu polisi yang berwenang melakukan penyelidikan dan

¹¹Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI...*, h.195.

¹²Arief Shidarta, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.83.

¹³Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI...*, h.158-159.

penyidikan, jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka pengadilan, dan hakim (*judge*) yang memeriksa dan memutus perkara, serta jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan pidana (*criminal verdict executor*).¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, FPI merupakan organisasi masyarakat yang tugas dan wewenangnya telah diatur oleh undang-undang. Sehingga aksi *sweeping* kelompok FPI tanpa bersama-sama pihak pemerintah, dapat dikategorikan sebagai tindak penegakkan hukum sendiri yang melampaui hakikat demokrasi konstitusi. Dengan demikian, aksi tersebut dapat berpotensi timbulnya kerusuhan antara FPI dan para pendukung tempat maksiat atau bahkan masyarakat sekitar di kehidupan demokrasi Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kelompok Front Pembela Islam melakukan aksi *sweeping* dalam menegakkan konsep *amar ma'rûf nahî munkar*?
2. Bagaimana konsep *amar ma'rûf nahî munkar* yang menggunakan unsur kekerasan dalam kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia?

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Ke-X* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h.20.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami pandangan kelompok Front Pembela Islam melakukan aksi *sweeping* dalam menegakkan konsep *amar ma'rûf nahî munkar*.
- b. Memahami konsep *amar ma'rûf nahî munkar* yang menggunakan unsur kekerasan dalam kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis dengan mengacu pada sumber teori-teori yang ada terutama ilmu Siyasah Syar'iyah pada umumnya dan khususnya dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang hukum siyasah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi Siyasah Syar'iyah pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.

F. Telaah Pustaka

Berbagai alasan munculnya gerakan Islamisme di Indonesia, berkembang pesat setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Menurut Greg Fealy dan Virginia Hooker, tumbuhnya kelompok yang mengatasnamakan agama adalah akibat terbuka lebarnya kran demokratisasi pasca reformasi ikut memengaruhi tumbuh-kembang kelompok Islamisme yang berpotensi menjadi gerakan radikal.¹⁵ Isu adanya gerakan radikal di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, berbagai kelompok seperti Front Pembela Islam, Laskar Pembela Islam, dan gerakan Islam radikal lainnya telah menjadi warna dalam kehidupan demokrasi pasca Orde Baru saat ini. Adanya gerakan radikalisme menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, ada empat kriteria suatu gerakan dianggap radikal, yaitu memperjuangkan Islam secara kaffah, di mana syariat Islam sebagai hukum negara, mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (*salafi*), cenderung memusuhi barat, terutama terhadap sekularisme, modernisasi dan perlawanan terhadap liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia.¹⁶

¹⁵Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, “Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), (Online), h.594. Tersedia di: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/57501-ID-none.pdf&ved=2ahUKEwiU2raZnOTkAhWbfH0KHZgWDkcQFjABegQIBxAC&usg=AOvVaw174UqRdjYmRRtzZ_vLycaZ (diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 13:25 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁶*Ibid.*

Menurut Ali Sodiqin, pergerakan syari'at Islam di Indonesia memiliki problematika secara historis dan empiris.¹⁷ Pengalaman buruk atas kerasnya hagemoni negara di masa Orde Baru, semakin menambah semangat munculnya gerakan Islam. Hal ini ditandai dengan adanya batas ruang gerak rakyat untuk ikutserta berkontribusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Ditambah lagi akibat dari buruknya sikap dan kebijakan negara pada proses reformasi yang tidak selesai. Ini terlihat dari keberlakuan hukum kolonial Belanda yang memutarbalikkan fakta berlakunya hukum Islam, menjadi penyebab terpinggirnnya syariat Islam dari sistem hukum negara. Fenomena ini melahirkan kesadaran masyarakat yang memahami syariat Islam sebagai solusi dan jalan hidup yang bersifat totalistik, tanpa mempertimbangkan aspek historisitas dan kontekstualistasnya. Sehingga memunculkan paham Islamisme yang bersifat formalisasi daripada substansi.

Menurut Siti Mahmudah, munculnya gerakan Islamisme tidak terlepas dari pengaruh *al-Ikhwān al-Muslimūn* pada tahun 1928. Akibat adanya tarik-menarik dengan relasi kuasa yang ada pada masa itu.¹⁸ Efeknya sampai ke berbagai

¹⁷Ali Sodiqin, "Genealogi Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015), (Online), h.22. Tersedia di: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1378/1199> (diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 11:21 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁸Siti Mahmudah, "Islamisme; Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Aqlam*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), (Online), h.2. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/240910-islamisme-kemunculan-dan-perkembangannya-15eca785.pdf> (diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 11:20 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

belahan dunia, termasuk Indonesia. Titik puncaknya ialah berada pada masa reformasi, sesaat lenyapnya Orde Baru. Islamisme sendiri merupakan gerakan massa, untuk sebuah perubahan sosial akibat ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap rezim yang dianggapnya tidak peduli rakyat.¹⁹ Dalam praktiknya, cita-cita pergerakan Islamisme dalam bentuk tatanan di sebuah negara, ialah untuk mewujudkan negara Islam. Gerakan ini mengenal paham yang ingin mewujudkan syariat Islam seperti di masa Rasulullah saw. Menurutnya, pemahaman tersebut tidak lagi relevan dengan konteks masa kini. Alasannya, hukum syariat Islam itu tidak dapat dirubah, tetapi penerapan hukumnya bersifat fleksibel. Sehingga tidak ada kekakuan dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari selama tetap dalam koridor hukum Islamnya.

Adapun menurut Syarifuddin Jurdi, gerakan sosial Islam muncul dikarenakan adanya proyek kemanusiaan untuk mentransformasi kehidupan masyarakat menjadi lebih berkualitas dan merefleksikan nilai-nilai Islam.²⁰ Adanya gerakan sosial Islam menjadi kekuatan baru dalam politik global (*pax global Islamism*). Hal ini menunjukkan bahwa munculnya Islamisme bukanlah momok yang perlu ditakuti akan aksi ekstrimisanya, melainkan mendekatkan

¹⁹Siti Mahmudah, "Islamisme; Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia"..., h. 5.

²⁰Syarifuddin Jurdi, "Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1, (2013), (Online), h.1. Tersedia di: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/1615/1567> (diakses pada tanggal 01 Februari 2019 pukul 10:45 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

pada kehidupan *religious* islamis. Artinya, gerakan sosial Islam ini ditentukan oleh kondisi sosial dalam pengaplikasiannya. Sehingga gerakan ini sukses tumbuh dan berkembang dalam negara demokratis dibandingkan negara dengan sistem otoriter.

Berdasarkan pemaparan diatas, benang merah yang dapat dipahami bahwa adanya Islamisme di Indonesia merupakan wujud dari adanya kekecewaan terhadap rezim secara historis pasca runtuhnya sistem otoriter di masa Orde Baru, dan terbukanya kran demokrasi di masa reformasi. Gerakan Islamisme ini tidak dapat dihindari, mengingat bahwa demokrasi mendukung adanya masyarakat madani meskipun sering menggunakan kekerasan dalam implementasinya. Tetapi, adanya gerakan ini menjadi warna dan tantangan dalam proses berdemokrasi. Oleh karena itu, penulis ingin memaparkan sisi lain dari munculnya gerakan Islamis, yaitu disebabkan oleh sensitifitas terhadap isu kemunkaran dan kemaksiatan dalam mempertahankan aqidah Islam yang terjadi di kehidupan demokrasi Indonesia.

Mengingat kesimpulan diatas, maka penulis menawarkan solusi sebagai jawaban dari problematika diatas. Demi mewujudkan kehidupan masyarakat madani yang toleran dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, solusi yang penulis tawarkan ialah diperlukan ketegasan aparaturnegara dalam menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagai pengontrol kehidupan demokrasi Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian (*research*) ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat berdasar jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, naskah, kisah, dokumen, majalah, jurnal dan lainnya.”²¹

Terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dalam konsep *amar ma'rûf nahî munkar* FPI dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu “suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”²²

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketiga* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h.33.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h.10.

Dalam hal ini, penulis ingin menggambarkan dan menguraikan secara objektif terkait konsep *amar ma'rûf nahî munkar* FPI dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah “bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat maupun bahan hukum yang dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku.”²³

Kemudian kaitan dengan penelitian ini adalah upaya mencari data-data yang berdasar pada buku-buku yang terkait dengan FPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam demokrasi konstitusi di Indonesia. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengesampingkan hukum (*illegal*) yang rentan mencederai kehidupan demokrasi di Indonesia.

b. Data Sekunder

²³*Ibid.*, h.52.

Data sekunder adalah “bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”²⁴

Kemudian kaitan dengan penelitian ini adalah upaya mencari data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, pendapat ahli, dan sebagainya yang berkenaan dengan judul yang dibahas oleh penulis, yaitu pandangan demokrasi mengenai aksi kekerasan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) dalam menegakkan konsep *amar ma'rûf nahî munkar*.

c. Data Tersier

Data tersier adalah “bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”²⁵

Kemudian kaitan dengan penelitian ini adalah upaya untuk mencari data-data yang berdasar dari kamus, transkrip, wikipedia, internet, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul yang dibahas, yaitu konsep *amar ma'rûf nahî munkar* FPI dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan survey kepustakaan dan studi literatur

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Survey kepustakaan yang dimaksud ialah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain yang dihimpun kedalam sebuah daftar pustaka, sedangkan studi literatur yang dimaksud ialah dengan mempelajari, memahami, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh seluruhnya kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan cara, antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang diperoleh tersebut dan relevansi dari data-data yang diperoleh berdasar pada fenomena lapangan maupun studi literatur yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian.
- b. Penandaan data (*coding*) merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang tingkat kevaliditasan datanya dapat dipercaya. Cara ini dilakukan sebagai usaha untuk

meringkaskan data penelitian dengan memberikan simbol angka pada uraian-uraian yang penting berdasar pada data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

- c. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan yang berdasar pada kronologis masalah yang diperoleh dari hasil penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif. Kemudian menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan menarik dari hal-hal khusus ke umum. Adapun pengolahan data menggunakan teori demokrasi konstitusi maupun Islam, berdasar UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dan pendapat para tokoh. Cara kerjanya, data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Setelah data-data terhimpun dan selesai diolah, proses selanjutnya ialah dengan melakukan analisa secara berlapis. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Sedangkan proses

pengembangan analisa datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori, dan imajinasi kreatif penulis secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data.

BAB II

DEMOKRASI ISLAM DAN INDONESIA

A. Demokrasi dalam Islam

Istilah demokrasi dikenal dalam Islam dengan sebutan *syûrâ* (musyawarah). Secara bahasa, musyawarah (*syûrâ*) berarti memaparkan dan menerangkan sesuatu untuk mendapatkan jalan keluar.¹ Sedangkan dalam istilah, musyawarah (*syûrâ*) menurut beberapa ulama sebagai berikut:

1. Al-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan sebagai proses beradu argumen untuk saling memperbaiki argumen antara peserta musyawarah (*syûrâ*),
2. Ibnu al-Arabi al-Maliki mengartikan sebagai wadah untuk saling menyalurkan pendapat dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan.

Dapat disimpulkan bahwa musyawarah (*syûrâ*) adalah suatu cara yang ditempuh untuk saling mengungkapkan ide atas suatu persoalan. Tujuan daripada musyawarah (*syûrâ*) ialah untuk mendapatkan titik terang terhadap suatu persoalan. Biasanya dilakukan dengan cara duduk bersama para peserta musyawarah (*syûrâ*).

¹Muhammad Nur Ichwan Muslim, “Syura dalam Pandangan Islam dan Demokrasi.” (Online). Tersedia di: <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2019).

Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhai Allah swt. Sebelum wafatnya, Rasulullah meninggalkan dua perkara yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kandungan di dalamnya, menjadikan kunci penyelesaian di berbagai permasalahan hidup. Sehingga siapapun yang berpegang teguh pada keduanya, maka akan selamat dunia dan akhirat. Karenanya, apa yang secara sederhana disebut sebagai hukum Islam, sebenarnya lebih tepat dinamakan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam.² Sebagaimana Allah swt., berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*” (Q.S. al-Ahzab [33]: 21)

Ayat diatas menegaskan bahwa Rasulullah wajib dijadikan teladan bagi umat Islam. Abdullah bin Umar menerangkan tentang Rasulullah saw., bahwa sesungguhnya saya menemukan sifat Rasulullah dalam kitab-kitab terdahulu itu demikian, yaitu tutur kata yang tidak kasar, lembut hatinya, tidak pernah berteriak keras di pasar, dan tidak suka membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan

²Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h.35.

lagi, tetapi beliau memaafkan dan mendoakan ampunan untuknya. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi kekalahan dalam perang Uhud.

Perang Uhud terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi (7 Syawal 3 Hijriah) yang berlokasi di bukit Uhud. Perang Uhud ini terjadi akibat kekalahan kaum kafir Quraisy di Perang Badar yang terjadi satu tahun lalu.³ Akibatnya, kaum Quraisy berbai'at dengan Abu Sufyan dan kafilah dagang untuk membalas dendam kepada kaum Muslimin. Sehingga terjadi penyerangan kembali yang dilakukan oleh kaum Quraisy dengan membawa para wanita Quraisy sebagai pemberi semangat di Perang Uhud.

Dalam peristiwa Uhud, kaum Quraisy berjumlah tiga ribu orang sedangkan kaum Muslimin hanya seribu orang. Awalnya, kaum Muslimin berhasil membuat kaum Quraisy lari terpecah-belah. Sehingga kaum Muslimin mengira bahwa perang sudah usai dan berusaha mengumpulkan *ghanimah*. Ketika kaum Muslimin sibuk mengumpulkan *ghanimah*, pasukan panah Muslimin yang berjumlah empat puluh orang ikut turun untuk mengumpulkan *ghanimah*. Hal ini menjadi perhatian bagi pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga Khalid memerintahkan kembali untuk menyerang kaum Muslimin dari arah belakang di bukit Uhud. Akibatnya, kaum Quraisy berhasil membunuh sepuluh pasukan panah kaum Muslimin yang berada di puncak bukit Uhud. Oleh

³Alymansur, "Sejarah Perang Uhud Singkat dan Lengkap." (Online). Tersedia di: <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019).

sebab itu, seorang wanita Quraisy yang bernama Amrah binti Alqamah al-Haritsiyah, segera mengibarkan panji pertempuran yang mengembalikan semangat pasukan Quraisy untuk menyerang kaum Muslimin kembali. Sehingga kaum Muslimin banyak yang gugur dan tiga ratus pasukan Abdullah bin Ubay melarikan diri ke Madinah. Alhasil, kaum Quraisy dapat mengalahkan kaum Muslimin yang saat itu berjumlah tujuh ratus orang.

Setelah perang usai, terjadi perdebatan diantara kaum Muslimin yang saling menyalahkan satu sama lain. Akibat perdebatan ini, maka Rasulullah belum mengambil tindakan. Hingga akhirnya, Allah swt., menurunkan sebuah ayat yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. ali-‘Imran [3]: 159)

Ayat diatas menyeru kepada Rasulullah saw., untuk menyelesaikan setiap persoalan terkait politik, peperangan, kemasyarakatan dan lainnya melalui musyawarah. Dengan tauhid, Islam menegakkan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan perbenturan keyakinan.⁴ Prof. Abdul Qadir Audah menjadikan ayat diatas sebagai legitimasi prinsip musyawarah (*syûrâ*). Hal ini terlihat ketika Rasulullah saw., membuat Piagam Madinah sebagai konsensus kehidupan majemuk di Yatsrib (Madinah).

Piagam Madinah dibuat oleh Rasulullah saw., pada tahun 622 Masehi sebagai perjanjian antara kaum Muslimin dan non-muslim Yatsrib. Piagam Madinah ini berisi 47 butir kesepakatan yang berhasil mempersatukan berbagai kepentingan kelompok, suku, golongan, maupun agama. Hal ini tertulis di dalam Pasal 1 yang menegaskan bahwa ini adalah naskah dari Muhammad, Nabi dan Rasulullah saw., sesungguhnya mereka yang mengikuti perjanjian ini adalah satu bangsa-negara (*ummat*), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.⁵ Adanya Piagam Madinah menunjukkan bahwa Rasulullah saw., mementingkan kehidupan umat daripada nasab.

⁴Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful Islam, 2007), h.6.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jilid I*. (Indonesia: Prenadamedia Group, 2014), h.324. Lihat juga dalam karya Von Edison Alouisci, *Naskah Piagam Madinah* (Oku Selatan: Von Edison Alouisci, 2012), (Online), h.1. Tersedia di: <https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/03/piagam-madinah.pdf> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09:30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di dalam Piagam Madinah, Rasulullah saw., telah menetapkan penyelesaian konflik melalui musyawarah (*syûrâ*). Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 bahwa apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad saw.⁶ Artinya, setiap persoalan dikembalikan kepada seorang *ulil 'amri*, yaitu Muhammad saw. Hal ini tentu melalui proses musyawarah seperti yang ditegaskan kembali dalam Pasal 42 Ayat 1 berbunyi, tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad saw.⁷ Ini yang dikatakan oleh Abu al-Hasan al-Mawardhi dan Abu Ya'la al-Farra' yang meletakkan mekanisme *syûrâ* terkait persoalan sosial perlu intervensi oleh *ulil 'amri*.⁸ Sehingga prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan demokratis Islam yang tertuang dalam Piagam Madinah antara lain:

1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat manusia,
2. Menjunjung tinggi kekeluargaan dan solidaritas sosial,
3. Menjunjung tinggi perlindungan dan pembelaan terhadap kaum lemah,
4. Menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan sosial,

⁶*Ibid.*, h.4.

⁷*Ibid.*, h.6.

⁸Khalil Abdul Karim, *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, terjemahan Kamran As'ad (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), h.144.

5. Menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan,
6. Menjunjung tinggi kebebasan beragama,
7. Menjunjung tinggi persamaan hukum dan ketaatan kepada pemimpin,
8. Menjunjung tinggi HAM, nasionalisme dan musyawarah.⁹

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat *al-Khalifah al-Rasyidin* mulai memegang tongkat kepemimpinan Islam. Di masa para sahabat, praktik syariat Islam berubah dari *wahyullah* menjadi *ijtihad*. Alasannya, karena *wahyullah* hanya ada di zaman Rasulullah, sedangkan Muhammad saw., adalah utusan terakhir Allah swt. Padahal permasalahan hidup selalu dinamis dan memerlukan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikannya. Sehingga di masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*, seringkali berkonsultasi untuk menjaring pendapat dari para sahabat lainnya.¹⁰ Oleh sebab itu, para sahabat menerapkan *ijtihad* sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan umat yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw., tanpa keluar dari koridor syariat Islam.

Upaya ini berlangsung hingga zaman dinasti Islam. Di tangan para raja, berbagai persoalan sosial-politik diselesaikan bersama para pejabat pemerintah kerajaan. Akibat kemunkaran yang terjadi di tubuh kerajaan, akhirnya demokrasi kepemimpinan Islam berakhir. Sehingga lahir masa kebangkitan di barat, dimulai

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa' Al-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.135.

¹⁰Khalil Abdul Karim, *Syari'ah...*, h.141.

dari daratan Eropa. Eropa mengenalkan demokrasi dengan *style* berbeda dari ajaran agama. Sehingga memunculkan budaya-budaya *obscene* yang dikenal sampai saat ini. Ini yang dikatakan sebagai kemunduran Islam. Dengan demikian, demokrasi Islam lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan umat manusia yang melahirkan individu-individu Islamis tanpa mengutamakan hawa nafsu.

B. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu *demos* dan *cratos* atau *cratein*. Secara bahasa, *demos* berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* berarti kedaulatan ataupun kekuasaan.¹¹ Definisi demokrasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Abraham Lincoln, demokrasi adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. R. Kranenburg mendefinisikan demokrasi sebagai cara memerintah oleh rakyat.
3. Maurice Durverger, demokrasi artinya suatu cara dalam pemerintahan yang antara golongan memerintah dan diperintah, keduanya sama dan tidak terpisah-pisah.

¹¹Marwan, "Sejarah Demokrasi di Dunia dan di Indonesia." (Online). Tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/sejarah-demokrasi/amp> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, hal ini berarti bahwa para ahli menempatkan posisi rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga demokrasi merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan negara dengan menempatkan posisi rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.

Dalam catatan sejarah, demokrasi sudah lama dikenal oleh manusia sejak zaman purba. Namun, kehadiran demokrasi kala itu masih belum dikenal jelas oleh manusia, melainkan hanya konsep-konsep dan praktik pengambilan keputusannya saja. Ahli antropologi menyatakan bahwa kelahiran bentuk-bentuk demokrasi bermula pada kelompok kecil seperti pemburu dan peramu, sebelum masyarakat mengenal pertanian dan hidup *nomaden* (berpindah-pindah). Dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri sekitar 50-100 orang, masyarakat mempersatukan hubungan dengan cara ikatan kekeluargaan. Ketika mengambil keputusan, masyarakat kecil itu melaksanakan mufakat atau suara terbanyak dengan duduk bersama kelompok tanpa adanya pemimpin khusus. Ini yang dikatakan sebagai model demokrasi *tribalisme* (demokrasi primitif).

Konsep-konsep demokrasi di masa primitif berlanjut secara turun-temurun sampai pada manusia sudah mengenal cocok tanam dan hidup *sedenter* (menetap). Hingga akhirnya kata demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh ahli politik dan filsuf Yunani kuno, yakni Cleisthenes. Demokrasi lahir di kota Athena, Yunani kuno sekitar tahun 508 sebelum Masehi. Kala itu, Cleisthenes memegang jabatan

sebagai Archon (Perdana Menteri). Kemudian ia memperbaiki sistem pemerintahan dan ketatanegaraan setelah masa pemerintahan Tirani (*Tyrannos*) yang dijabat oleh Solon (638-558 sebelum Masehi).¹² Cleisthenes melakukan perbaikan pada kebebasan masyarakat untuk menduduki jabatan negara yang ada, kecuali komandan militer. Hal ini dikarenakan pada masa sebelumnya, masyarakat hanya boleh menduduki jabatan Ekklesia (majelis rakyat) dan Heliaia (badan peradilan).

Syarat untuk menduduki jabatan negara, yaitu berasal dari keturunan ayah-ibu asli orang Athena (Attika) yang bergender laki-laki telah berusia 20 tahun. Masa pergantian jabatan yang diduduki oleh masyarakat hanya satu tahun sekali. Sehingga hampir setiap warga Athen telah menduduki jabatan pemerintahan negara. Alasannya, Cleisthenes ingin menyadarkan setiap individu masyarakat ikut-serta memperhatikan nasib negaranya. Sehingga seringkali Archon melaksanakan demokrasi bersama rakyat di pasar-pasar, yang disebut sebagai teori demokrasi klasik (demokrasi pasar). Adapun cara yang dilakukan untuk memegang jabatan negara, yaitu dengan sistem undian.

Sistem undian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk menegakkan demokrasi langsung dengan melibatkan rakyat dalam memilih seorang pejabat negara. Adanya sistem undian ini dianggap masyarakat sebagai cara yang paling

¹²Rifai Shodiq Fathoni, "Sejarah Demokrasi." (Online). Tersedia di: <https://elearn.id/blog/mengintip-sejarah-demokrasi-di-dunia/> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2019).

adil. Alasannya, pemilihan jabatan dilaksanakan langsung oleh rakyat tanpa suap dan memaksa orang lain. Selain itu, sistem undian ini dianggap oleh masyarakat Athena sebagai pilihan dewa. Alasannya, masyarakat Athena meyakini bahwa pemilihan yang didasarkan pada kehendak diri, akan mendapat petaka yang berujung pada penolakan rakyat terhadap dirinya. Oleh sebab itu, Cleisthenes dikenal sebagai Bapak Demokrasi Athena.

Konsep-konsep demokrasi diatas melekat pada berbagai bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang termahsyur (aristokrasi), satu orang (monarki), para tiran (tirani) dan lain sebagainya di berbagai wilayah dunia. Meskipun pada dasarnya, sulit menentukan ketepatan berlangsungnya demokrasi tersebut. Namun, Athena dapat dijadikan acuan dalam kehidupan demokrasi bagi perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan suatu negara lainnya.

Di masa *Renaissance*, Eropa masih mengenal perbudakan (*Vassal*) dan tuan (*Lord*).¹³ Sehingga kebebasan sosial sangat dibatasi oleh Paus dan kaum gereja. Ketika itu masyarakat terdoktrin di bawah pengaruh gereja dengan pola pikir *momento mori* (ingat akan kematian). Sehingga setiap sendi kehidupan sosial maupun pemerintahan, ada diintervensi dari kaum gereja. Alasannya, untuk menegakkan syariat keagamaan yang lurus.

¹³Elearn, "Mengintip Sejarah Demokrasi di Dunia." (Online). Tersedia di: <https://elearn.id/blog/mengintip-sejarah-demokrasi-di-dunia/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2019).

Peristiwa diatas menjadi momentum terbalik, ketika Eropa mengenal pola pikir *momento vivere* (ingat akan kehidupan). *Renaissance* mengedepankan cita-cita hidup untuk hidup dalam kebebasan berpikir, berpengetahuan, dan mementingkan kekuatan diri tanpa menolak adanya Tuhan. Ini menjadi tolak ukur kemajuan peradaban dunia barat di segala aspek kehidupan. Termasuk mengakarnya paham demokrasi yang semakin berkembang hingga berhasil mempengaruhi sistem pemerintahan negara-negara di benua Eropa memasuki abad *Renaissance* sekitar abad 6-14 Masehi.

Kemunculan demokrasi Eropa ditandai adanya perjanjian Magna Charta antara Raja John, Paus Innocent III dan kaum bangsawan Baron di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 Masehi. Perjanjian itu berisi sebagai berikut:

1. Menuntut pengakuan raja beserta keturunannya untuk menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja.
2. Menuntut raja untuk berjanji kepada penduduk kerajaan atas hak-hak rakyat,
3. Menuntut para petugas keamanan dan pemungut pajak untuk menghormati hak-hak rakyat,
4. Menuntut polisi atau jaksa agar tidak mempidanakan seseorang tanpa ada bukti dan saksi yang sah,

5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan dasar hukum atas tindakannya,
6. Menuntut raja untuk meninjau kembali kesalahan seseorang tanpa perlindungan hukum pada orang yang sudah dijatuhkan sanksi pidana,
7. Menuntut pembatasan kekuasaan kerajaan,
8. Mementingkan HAM daripada kekuasaan, hukum maupun kedaulatan.¹⁴

Lahirnya Magna Charta, menunjukkan ciri demokrasi barat yang mementingkan kebebasan negara dengan menjauhkan agama sebagai pedoman kehidupannya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan budaya barat yang memperkenalkan rasionalisme, realisme dan humanisme, yang disebut sebagai teori kontrak sosial. Alhasil, melegalkan kemaksiatan di tengah kehidupan rakyat. Selain itu, dampak yang signifikan terjadi pada kaum barat ialah berkembangnya sikap individualistik. Akibat dari pemisahan antara negara dan agama yang sangat renggang. Ini yang dikenal sebagai paham *sekularisme*.

Perjanjian Magna Charta telah membuka kran demokrasi bagi pemerintahan negara-negara yang ada di dunia. Meskipun paham demokrasi telah ada jauh sebelum Masehi, tetapi Eropa menyebarkan kembali setelah runtuhnya kedaulatan *al-Khulafa' al-Rasyidin* melalui ekspansi hegemoni barat yang dimulai

¹⁴Silviana Dharma, "Historipedia: Magna Charta Lahir dari Perseteruan Antara Raja John, Paus dan Baron." (Online). Tersedia di: <https://elearn.id/blog/mengintip-sejarah-demokrasi-di-dunia/> (diakses pada tanggal 07 September 2019).

pada masa Napoleon Bonaparte. Sehingga Belanda yang dahulu pernah dijajah oleh Perancis, kembali menerapkan hukum kolonial dan berbagai praktik kehidupan Eropa di Indonesia.

Paham demokrasi yang dibawa Belanda, telah dipengaruhi oleh demokrasi modern dalam *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesquie. Dalam teorinya, Montesquie membagi tiga kelompok badan negara antara lain:

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang,
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang,
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Adanya teori *Trias Politica* menunjukkan bahwa demokrasi modern telah menjadi demokrasi perwakilan.

Akibat hagemoni barat, memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Indonesia yang saat itu baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, membutuhkan sistem hukum dan praktik kehidupan bangsa dan negara yang majemuk. Sehingga pada masa Orde Lama, Soekarno menetapkan hukum kolonial yang bertolak ukur pada UUD 1945, dan mempraktikkan asas demokrasi yang bertolak ukur pada Pancasila dalam setiap

sendi pemerintahan Indonesia. Alasannya, semua faktor perbedaan itu dapat saling bertransisi menuju demokrasi Indonesia yang berlangsung lebih *smooth*.¹⁵

Sejak saat itu, Indonesia telah menganut praktik kehidupan demokrasi. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia menjadi salah satu poros pemerintahan demokrasi di dunia. Di masa Orde Lama, Indonesia menerapkan dua demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Perlementer atau Liberal (1950-1959)

Dalam demokrasi parlementer, Presiden diposisikan sebagai kepala negara dan parlemen memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Demokrasi ini dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Alasannya, banyak perkembangan partai politik, hak politik rakyat terjamin, akuntabilitas politik tinggi, dan terwujudnya pemilu yang bebas. Tetapi, ada kelemahan dalam sistem parlementer ini, diantaranya karena:

- a. Rendahnya dasar-dasar sosial-ekonomi rakyat, sehingga rentan mengalami ketidakstabilan ekonomi,
- b. Adanya kepentingan politik yang tak terkendali,
- c. Adanya konflik internal angkatan bersenjata yang berpeluang memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa,

¹⁵Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.268.

- d. Singkatnya masa kerja kabinet yang menghambat realisasi program pemerintahan, akibatnya terbengkalai.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dalam demokrasi terpimpin, posisi Presiden sebagai pemegang otoritas pemerintahan tertinggi. Hal ini didasarkan akibat ketidakpuasan Soekarno atas partai-partai politik yang selalu mementingkan kelompoknya dibandingkan rakyat. Sehingga karakter dari demokrasi ini telah membatasi peran partai politik, meningkatnya pengaruh komunis, DPR diganti menjadi DPR Gotong Royong, pembentukan lembaga inkonstitusional dan MPRS yang dikendalikan langsung oleh Presiden. Akibatnya, hal ini menunjukkan bahwa Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin yang tak lebih dari selubung bagi otoritarianismenya.¹⁶ Demokrasi ini berakhir akibat kegagalan Soekarno dalam menyeimbangkan dua pengaruh kekuatan, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan militer negara. Ini yang menjadi akhir dari masa kepemimpinan Soekarno.

Berakhirnya Orde Lama ditandai dengan adanya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) yang ditujukan kepada Soeharto pada tahun 1966. Ini menandakan lahirnya Orde Baru. Di masa Orde Baru, Soeharto mengembalikan

¹⁶*Ibid.*, h.269.

keberlakuan UUD 1945 dengan berpedoman dalam butir Pancasila. Alasannya, demokrasi Orde Baru mempunyai tekad untuk mengabdikan pada kepentingan rakyat dan nasional. Oleh karena itu, demokrasi Orde Baru dikenal sebagai demokrasi Pancasila.

Dalam praktiknya, Soeharto mensakralkan UUD 1945 dan Pancasila dengan berbagai ancaman dan bertindak subversif bagi yang menafsirkannya, kecuali pemerintah.¹⁷ Selain itu, pemerintah hanya mengakui tiga kekuatan politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya (Golkar). Pembagian ini dilatarbelakangi akibat ketidakseimbangan politik di masa Soekarno yang banyak partai politik. Sehingga menjadi pembelajaran bagi rezim Orde Baru untuk memperkokoh kekuatan politik di tangan Presiden. Namun, dalam realita pemerintahan banyak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin memperburuk perekonomian negara. Ditambah dengan meningkatnya kekuasaan ABRI hingga akhirnya terjadi kerusuhan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada tahun 1998. Hal ini membuktikan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak rakyat untuk mewujudkan demokrasi yang *bottom up*. Alasan ini yang menjadi penyebab keruntuhan rezim Orde Baru.

¹⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h.145.

Setelah Orde Baru, demokrasi di Indonesia berada di tangan Presiden B.J. Habibie yang bertransisi menjadi demokrasi kontitusional di era Reformasi. Ditandai dengan adanya jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen.¹⁸ Demokrasi di era reformasi menjadi tolak ukur perubahan bangsa dan negara yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari menyusutnya nilai tukar mata uang dollar terhadap rupiah, amandemen UUD 1945, lahirnya berbagai macam UU reformasi, pembubaran dwifungsi ABRI, mengembalikan pemilihan umum kepada rakyat, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional mementingkan hak-hak rakyat, sebagai kedaulatan tertinggi negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang praktiknya berlandaskan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁹

Hakikat demokrasi konstitusional, masih dipertahankan sampai saat ini. Akan tetapi, menegakkan nilai-nilai demokrasi secara *kaffah* masih belum terealisasikan. Hal ini terbukti pada pembangunan ekonomi daerah yang belum merata, kesenjangan sosial masih sangat dirasakan, tumpulnya hukum bagi orang-orang terpendang, lemahnya budaya hukum baik di kalangan masyarakat maupun pemerintahan yang menimbulkan konflik, masih terjadi praktik korupsi, kolusi,

¹⁸*Ibid.*, h.96.

¹⁹Redaksi Tangga Pustaka, *UUD 45 & Perubahannya* (Jakarta: Tangga Pustaka, 2009), h.3.

nepotisme (KKN), dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan kecacatan praktik demokrasi dalam masyarakat multikultur di Indonesia.

Diamond merumuskan beberapa langkah untuk mengkonsolidasi demokrasi yang rapuh, antara lain:

1. Memberi keluasan akses peradilan dan membangun *rule of law* yang sesungguhnya kepada warga negara,
2. Memberi penguatan dalam pembuatan hukum dan kekuasaan investigatif kepada badan legislatif,
3. Memberi desentralisasi kepada pemerintahan daerah,
4. Mengedepankan kepentingan rakyat melalui masyarakat politik otonom,
5. Membangun kekuatan masyarakat sipil yang independen, tetapi menguatkan kewenangan konstitusional dalam memelihara bangsa dan negara.²⁰

Rumusan diatas menjadi dasar terwujudnya asas-asas demokrasi.

Demokrasi mempunyai beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mengakui adanya keterlibatan rakyat dalam proses penyelenggara pemerintahan negara,
2. Mengakui adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM,
3. Mengakui adanya persamaan hak bagi setiap rakyatnya,

²⁰Suparman Marzuki, *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2014), h.21.

4. Mengakui adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen,
5. Mengakui adanya kebebasan bagi seluruh warga negara,
6. Mengakui adanya kebebasan pers dalam menyampaikan informasi,
7. Mengakui adanya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil,
8. Mengakui adanya pengakuan terhadap berbagai perbedaan baik suku, etnis, ras, budaya dan sebagainya).

Dalam praktiknya, penegakkan demokrasi Indonesia tidak akan berdiri tanpa penguatan dari kedaulatan hukum. Ini yang menjadi alasan bahwa Indonesia perlu menguatkan demokrasi berdasar pada hukum yang berlaku saat ini. Sesuai ketentuan yang tertulis di dalam Pasal 1 Ayat 3, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.²¹ Negara hukum Indonesia menganut konsep *rechstaat*, yang mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Mengakui adanya perlindungan HAM,
2. Mengakui adanya pemisah dan pembagian kekuasaan lembaga negara sebagai penjamin perlindungan HAM,
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku,
4. Mengakui adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan konsep di atas, Indonesia mengatur dan memperhatikan kehidupan penguasa dan rakyat berlandaskan hukum. Kedaulatan hukum pada

²¹Redaksi Tangga Pustaka, *UUD 45 & Perubahannya...*, h.3.

hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Karena hukum timbul akibat adanya kehidupan bermasyarakat. Sejak zaman Yunani kuno, ada usaha untuk pemisahan antara kedaulatan rakyat dan hukum yang selalu menjadi perdebatan. Hingga di zaman modern, perdebatan ini semakin terus terjadi. Keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian, keduanya saling menyatu dalam konsepsi negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum.²²

C. Konsep *Amar Ma'rûf Nahî Munkar* dalam Islam

Amar berasal dari kata *amara-ya'muru-amran* secara bahasa artinya menyeru atau menyuruh. *Al- Ma'rûf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu-ma'rûfan*, *'alima-ya'lamu-'ilman* artinya kebajikan atau perkara yang diketahui sebagai kebajikan. *Nahî* berasal dari kata *naha-yanha-nahyan* artinya mencegah atau melarang pada sesuatu. *Al-Munkar* berasal dari kata *ankara-yunkiru-inkaran-munkaran* artinya perkara buruk atau ditolak. Adapun menurut pendapat Ulama terkait definisi diatas, yaitu:

1. Ibnu Katsir memberikan definisi *al-ma'rûf* sebagai suatu kebajikan dan *al-munkar* sebagai suatu keburukan.²³

²²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi...*, h.211.

²³Kusnadi dan Zulhilmi Zulkarnain, "Makna *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab *The Message of The Qur'an*." *Jurnal Wardah*, Vol. 18, No. 2, (2017), (Online), h.97. Tersedia di: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/1777/1458> (diakses pada tanggal 17 April 2019 pukul 08:35 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Ibnu Jauzi mendefinisikan *al-ma'rûf* sebagai hal-hal yang dikenal kebenarannya oleh setiap orang berakal, dan lawannya adalah kemunkaran.²⁴
3. Sayyid Quthb mengartikan *amar ma'rûf nahî munkar* sebagai jalan yang harus ada jama'ah menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada yang *munkar*.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, *amar ma'rûf nahî munkar* merupakan suatu perbuatan yang mengajak kepada kebajikan dan melarang dari perbuatan buruk.

Islam merupakan agama Allah swt., yang mempunyai aturan-aturan Illahi. Sumber daripada aturan tersebut ialah al-Qur'an yang diperjelas dalam Sunnah Rasulullah saw. Seseorang yang taat pada ajaran Islam dalam keimanannya, tentu akan menjadikan dirinya sebagai individu yang sadar dan peka terhadap hukum.

Kehadiran suatu hukum, tentu mempunyai prinsip-prinsip. Karena prinsip sangat diperlukan untuk memudahkan penegakkan hukum tersebut. Oleh karena

²⁴Agus Fahmi, "Nilai-Nilai Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2018), (Online), h.52. Tersedia di: <http://repository.umj.ac.id/bitstream/123456789/340/1/Agus%20Fahmi%20Full%20Text.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 14:25 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁵Aidah Fathaturrohman, "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Sya'rawi)". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), (Online), h.7. Tersedia di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42162/2/AIDAH%20FATHATURROHMAH-FU.pdf> (diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 15:25 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

itu, para ahli merumuskan bahwa dalam pemerintahan Islam mempunyai prinsip-prinsip diantaranya:

1. Amien Rais merumuskan bahwa prinsip dalam negara Islam, ialah negara dan masyarakat berada diatas keadilan, adanya *syura'* (musyawarah), prinsip ukhuwah, kebebasan atau kemerdekaan bagi rakyatnya dan pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat.
2. Al-Maududi merumuskan bahwa ada sembilan prinsip dalam Islam, yaitu kedaulatan hukum berada di tangan Allah swt., adanya keadilan antarmanusia, adanya persamaan antarkaum muslimin, tanggung jawab pemerintah, permusyawaratan, taat dalam kebajikan, tidak tamak dalam kekuasaan, tujuan adanya negara, adanya *amar ma'rûf nahî munkar*.
3. Dedi Supriyadi merumuskan bahwa ada sembilan prinsip hukum Islam dalam negara, yaitu menegakkan tauhid, adanya keadilan (*al- 'Adl*), adanya persamaan hak rakyat (*al-Musawah*), kemerdekaan secara umum (*al-Hurriyah*), menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar*, adanya prinsip saling tolong menolong (*al-Ta'awun*), adanya prinsip toleransi (*Tasamuh*), ketaatan kepada penguasa (*al-Tha'ah bi Ulil 'Amri*), menghadirkan musyawarah (*al-Syura'*).

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu prinsip hukum Islam yang diturunkan kepada umat manusia ialah menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah swt., sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. ali-‘Imran [3]: 104)

Ayat diatas menurut Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa, menegaskan amar ma'rûf nahî munkar adalah wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan. Sehingga hukumnya *fardhu kifayah*. Adapun Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa menyeru kepada amar ma'rûf nahî munkar, hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Alasannya yaitu dengan memahami firman Allah swt., sebagai berikut:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. al-Taubah [9]: 122)

Ayat diatas menerangkan bahwa menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* tidak semestinya dilakukan oleh setiap orang, melainkan hanya sebagian orang saja. Menurut al-Maraghi, perintah tersebut ditujukan kepada segolongan orang, yaitu orang-orang mukmin.²⁶ Alasannya, orang-orang mukmin telah melewati fase keimanan yang mendalam dibanding seorang muslim. Orang-orang mukmin ialah orang yang paham tentang *ad-diin* (agama).²⁷ Sedangkan Syaikhul al-Sa'di menegaskan bahwa dalam berdakwah, Allah melazimkan seseorang harus memahami ilmu agama. Hal ini termasuk sebagai syarat dakwah yang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda.

Pemahaman ilmu keagamaan setiap orang berbeda-beda. Terlebih bahwa petunjuk Allah swt., kepada setiap manusia juga berbeda. Ada diantara manusia yang berada diatas petunjuk Allah swt., dan kemudian ia menerapkannya sampai pada dakwah *fî sabilillâh*. Namun, ada diantara manusia yang mendapat petunjuk, melainkan ia mengingkarinya hingga dirinya belum mampu untuk berdakwah diatas jalan Allah swt., Alasan ini yang menjadikan kemampuan setiap orang berbeda-beda.

Dalam hal diatas, bukan menjadi alasan untuk tidak menyeru kepada *amar ma'rûf nahî munkar*. Kebaikan perlu ditegakkan guna menjaga keamanan dan

²⁶Eko Purwono dan M. Wahid Nur Tualeka, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb." *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 1, No. 2, (2015), (Online), h.3-4. Tersedia di: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/download/1053/pdf> (diakses pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 08:10 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁷Yazid bin Abd Qadir Jawas, *Amar Ma'rûf Nahî Munkar: Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017), h.54.

kesatuan antara individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya hukum sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Sebagaimana firman Allah swt., sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. al-Nahl [16]: 125)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim hendaknya menyeru kepada hal-hal yang baik. Mengingat bahwa tujuan agama ialah menuntut umat Islam untuk menjaga akidah (*hifdzud diin*), akal (*hifdzul aql*), jiwa (*hifdzun nafs*), harta (*hifdzul maal*) dan keturunan (*hifdzun nasl*).²⁸ Ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang seyogianya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamais. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.

²⁸Budimansyah, “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh dalam Tinjauan Maqashid al-Din”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. X, No. 3, (Januari 2012), (Online), h.255. Tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/57416/gerakan-islam-jamaah-tabligh-dalam-tinjauan-maqashid-al-din> (diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 10:00 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketika masyarakat menegakkan syariat Islam, hukum dan akidahnya dijaga, maka inilah yang dimaksud sebagai masyarakat Islami. Dalam bernegara, adanya agama akan menjadi pondasi utama bagi seorang individu agar sadar adanya hukum. Ketika seorang individu berhasil menjaga ketaatannya dalam aturan agama, akan berdampak pada dirinya yang dapat menghormati dan menegakkan hukum-hukum yang berlaku di kehidupan demokrasi. Ini yang dimaksud Roscoe Pound bahwa *law is a process of social engineering, a process of adjusting and compromising conflicting claims.*²⁹

Pendapat Pound diatas menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat, penyesuaian diri dan penyelesaian konflik. Pandangan Pound sejalan dengan konsep *amar ma'rûf nahî munkar* yang mewujudkan kemaslahatan. Meskipun aturan agama tidak memaparkan secara detail terkait kewajiban penegakkan *al-ma'rûf* dan pencegahan *al-munkar* untuk dilaporkan kepada Sultan (penguasa). Menurut Ibnul Qusyairiy, bila setiap penegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* harus melapor, maka terdapat unsur merobek kehormatan dan menghilangkan harta.³⁰ Alasannya, bahwa penegakkan ini sebagai kewajiban bagi setiap mukmin dan orang mukallaf (dewasa).

²⁹Linus J. McManaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *St. John's Law Review*, Vol. 33, Numb. 1, (May 2013), (Online), h.45. Tersedia di: <https://pdfs.semanticscholar.org/ffb0/7326b64202ee7cdbe7140bc40a3d9d168f6e.pdf> (diakses pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 10:45 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

³⁰Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fanani Asy-Syafi'i, *Fathul Mu'in*, terjemahan Aliy As'ad (Ed 3) (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.330.

Amar ma'rûf nahî munkar merupakan poros utama dalam agama Islam. Selain dapat menjadi pengubah masyarakat (*social engineering*), konsep syariat Islam ini dapat menjadi kontrol sosial (*social control*). Konsep ini menimbulkan fungsi dan keberadaan hukum yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu di masa lalu hukum dipandang sebagai hasil dari kebudayaan, di masa sekarang hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan, dan di masa mendatang hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt., menghendaki tegaknya ikatan perkumpulan atas dasar akidah.³² Supaya manusia dapat hidup menjadi makhluk yang taat dan lurus baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Ibnul Qusyairiy, bahwa ada alternatif penegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* yang diharuskan untuk melaporkan kepada Sultan (penguasa), apabila dengan cara itu *amar ma'rûf nahî munkar* dapat ditegakkan di masyarakat.³³ Ini sejalan dengan pandangan Najmuddin al-Tufi yang mengedepankan *maslahat*. Al-Tufi menegaskan bahwa tidak sah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain), kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh

³¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.43.

³²Sayyid Quthb, *Fiqhud-Da'wah: Maudhu'at fi ad-Da'wah wal Harakah*, terjemahan Abdul Majid (Ed III) (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h.224.

³³Asy-Syafi'i, *Fathul Mu'in...*, h.330.

syara’).³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan penguasa dalam menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* sangat diperlukan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara, di mana unsur-unsur terbentuknya negara ialah adanya wilayah, rakyat, pengakuan *de facto* dan *de jure* dari negara lain serta pemerintahan yang berdaulat.³⁵ Oleh sebab itu, penguasa wajib hadir untuk rakyat dalam mengatur urusan pemerintahannya.

Menurut Ibnu Taimiyyah, penegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* menjadi kewajiban *ulil ‘amri*.³⁶ Sosok *ulil ‘amri* diantaranya ialah para ulama, pemimpin dan orang yang dipercaya sebagai pemangku adat. Ibnu Taimiyyah menempatkan ulama sebagai posisi utama. Alasannya, ulama menjadi sosok yang sangat dimuliakan bagi umat Islam. Selain itu, penguasa mendapati posisi kedua yang dianggap sebagai wadah penegakkan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, posisi penguasa sangat penting dan paling berpengaruh untuk kehidupan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari setiap kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya, seperti peraturan perundang-undangan, pembangunan struktur dan infrastruktur maupun yang lainnya. Ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antara

³⁴Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali).” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2, (2017), (Online), h.447. Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2414/2394> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 14:45 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

³⁵Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Ed 9) (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.75.

³⁶Noorhaidi Hasan dkk., *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019), h.142.

kehidupan rakyat bersama pemerintah negara dalam bingkai politik pemerintahan Islam.

Islam hadir dengan mengajarkan kepada *rahmatan lil 'alamin*. Makna *rahmatan lil 'alamin* sangat luas, salah satunya menaati aturan hukum negara sebagai wujud ketaatan kepada pemimpin. Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. al-Nisa [4]: 59)

Ayat diatas memerintahkan manusia untuk tetap diatas koridor *ukhuwah* dalam ketaatan kepada Allah swt., Rasulullah saw., dan pemimpin (*khalifah*). Al-Maraghi mengemukakan bahwa khalifah diartikan sebagai pengganti Allah swt. dengan misi untuk menegakkan perintah-perintah-Nya terhadap manusia. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah merupakan tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia (sosial politik). Hal ini senada dengan al-Suyuti yang menganggap bahwa khalifah adalah kepala

pemerintahan umat Islam. Adapun syarat wajib bagi seorang pemimpin, menurut Abu al-Hasan al-Mawardi, yaitu seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang adil (*al-'adl*), seorang pemimpin harus orang berilmu, sehat jasmani dan rohani, tidak ada kecacatan badan dan mental, intelektualitas, dan berjiwa pemberani.

Pemimpin merupakan orang yang paling penting dalam suatu negara dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pemahaman terbentuknya sebuah negara, salah satunya ialah adanya pemerintah yang berdaulat. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkan hukum-hukum Allah swt., melalui pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Natsir bahwa negara adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesempurnaan berlakunya undang-undang Illahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai individu, ataupun sebagai anggota dari masyarakat, baik terkait kehidupan dunia maupun akhirat.³⁷ Pandangan ini sejalan dengan Hasan al-Banna yang mengatakan bahwa *believed that Tauhid, or the oneness of God, following shari'a and applied the ruler by the teachings of Islam are fundamental principles that a state must follow.*³⁸ Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum mengangkat seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan antara lain:

³⁷Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.181.

³⁸Alaa Al-Din Arafat, *The Rise of Islamism in Egypt* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), (Online), h.251. Tersedia di: <http://185.39.10.101/ads.php?md5=F7BFB135B96B3AF3EFC2D0C037CA5E4> (diakses pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 19:00 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Mengangkat seorang pemimpin merupakan hukum wajib dalam agama.

Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadits diatas menggambarkan bahwa pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan berkelompok. Alasannya, pemimpin diharapkan mampu menjadi pioner dalam mewujudkan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, agama tidak akan tegak tanpa adanya seorang pemimpin yang *amanah*.

2. Pemimpin menjadi pioner dalam menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar*.

Hal ini telah Allah swt., perintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa melakukan jihad, tolong-menolong, menegakkan hukum dan lainnya. Ini yang menjadi alasan Ibnu Taimiyyah mengartikan bahwa pemimpin adalah wakil Tuhan di dunia.

3. Sebagai wujud dalam mendekatkan diri kepada Allah swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., dalam al-Qur'an, yaitu menaati-Nya, Rasul dan pemimpin. Ibnu Taimiyyah mengibaratkan bahwa pemimpin yang *zhalim* itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin.³⁹ Alasannya, kezhaliman itu

³⁹*Ibid.*, h.53.

terjadi atas kehendak diri sendiri yang bisa diluruskan menjadi lebih baik melalui nasihat. Sedangkan tidak ada pemimpin, berarti bertentangan kehendak Allah swt., dan Rasulullah saw., yang mengharuskan ada pemimpin.

Pemaparan diatas menegaskan bahwa pentingnya praktik *amar ma'rûf nahî munkar* untuk taat kepada seorang pemimpin dalam menaungi sekelompok manusia di suatu negara. Adanya pemimpin memudahkan umat dalam menegakkan nilai-nilai sosial dan agama melalui kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Kebijakan ini yang kemudian disebut sebagai sebuah hukum. Dengan demikian, hukum menjadi alat utama untuk menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* dalam kehidupan demokrasi, tanpa melanggar ketaatan pada pemimpin sebagai pembuat dan pelaksana hukum tersebut.

D. Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun menganut asas demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, tetapi tindakan-tindakan rakyat tetap diatur dalam peraturan-peraturan hukum negara. Alasan ini yang menjadikan konstitusi dan supremasi hukum sangat diperlukan untuk demokrasi.⁴⁰ Kesadaran pemimpin

⁴⁰Alaa Al-Din Arafat, *Egypt in Crisis The Fall of Islamism and Prospects of Democratization* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), (Online), h.239. Tersedia di:

akan keberadaan hukum negara, menjadi tanggung jawab dirinya sebagai sosok yang diamanahkan dalam menegakkan kemaslahatan hidup bersama.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa ada tiga poin penting dalam suatu sistem hukum (*elements of a legal system*), yaitu adanya pembuat hukum (*legal structure*), materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴¹ Artinya, suatu negara perlu mempunyai tiga komponen penting diatas sebagai langkah untuk memudahkan proses kehidupan berdemokrasi. Ini sejalan dengan pendapat Marc Galanter yang menyatakan bahwa ciri hukum modern, yaitu penerapannya bersifat teknis, seragam, transaksional, universal, hierarkis, birokratis, berkarakter politis, hanya dijalankan oleh kaum professional dan negara yang memiliki hak monopoli untuk menyelesaikan berbagai sengketa perselisihan.⁴² Oleh sebab itu, sistem hukum sangat diperlukan di Indonesia sebagai acuan dalam mengontrol dan memutus sebuah perkara ketika terjadi pelanggaran.

Sistem hukum Indonesia merupakan kumpulan daripada hukum yang saling mempengaruhi untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sebagai

<http://185.39.10.101/ads.php?md5=4E1C91FB5D52B6D0CC880CBBC8BD61BE> (diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 20:00 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴¹Lawrence Meir Friedman and Grant M. Hayden, *American Law an Introduction 3th Edition* (New York: Oxford University Press, 2017), (Online), h.5. Tersedia di: <http://185.39.10.101/ads.php?md5=C40A059855F926A800AAA6F61530CF4E> (diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 09:30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴²Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum Negara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.3.

acuan dalam menegakkan hukum negara.⁴³ Sistem hukum menjadi landasan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan negara. Terlebih lagi bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan hidup dalam keberagaman suku, ras, budaya maupun agama. Keberagaman ini yang membentuk karakter dan ciri khas masing-masing daerah. Oleh sebab itu, wadah untuk menyatukan berbagai perbedaan ini dikemas dalam sistem hukum nasional.

Terbentuknya sistem hukum Indonesia bermula dari pelayaran Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 ke Mesir. Ketika itu Napoleon membawa 276 perwira, 28.000 prajurit infanteri, 2.800 pasukan kavaleri, 2.000 prajurit artileri, 1.157 insinyur militer, dan 900 dokter, apoteker, perawat, ilmuwan, seniman dan penulis.⁴⁴ Awalnya, Napoleon mempunyai misi imperialisme. Seiring berjalannya waktu, ia sadar akan hukum di Perancis. Oleh karena itu, kedatangannya juga untuk memahami kehidupan masyarakat muslim di Mesir.

Setibanya di Mesir, terjadi invansi antara pasukan Napoleon dan Mamluk. Saat itu Mesir masih di bawah Turki Ottoman yang termasuk wilayah dinasti Mamluk. Namun, peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Napoleon. Hal ini dikarenakan Mamluk tidak mendapat dukungan dari Turki. Kemudian Napoleon

⁴³Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.39.

⁴⁴Juan Cole, *Napoleon's Egypt Invading the Middle East* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), (Online), h.8. Tersedia di: <http://185.39.10.101/ads.php?md5=1A5A0245E73F6AF62E451C1F389257D8> (diakses pada tanggal 02 Juli 2019 pukul 10:00 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

disambut hangat oleh rakyat Mesir dan berhasil merebut suatu wilayah kekuasaan dinasti Islam.

Ketika itu, Mesir merupakan negara muslim yang masih dalam kehidupan sederhana dan tidak memahami teknologi. Kedatangan Perancis ke Mesir juga membawa alat cetak yang dapat berbahasa latin, arab dan yunani yang dibuat oleh Coster dan Gutenberg. Sehingga alat tersebut menjadi benda asing bagi rakyat Mesir. Hal ini yang menjadi kesempatan Napoleon untuk menjalin kerjasama kepada ulama-ulama muslim di Mesir untuk berbagi ilmu antara kehidupan muslim dan barat. Adanya kesempatan ini, semakin mempermudah Napoleon untuk memperoleh berbagai data dalam rumusan hukum Perancis dengan cara memahami kehidupan muslim di Mesir.

Pada tahun 1801, Napoleon meninggalkan wilayah Mesir untuk kembali pulang ke Perancis. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisa bersama ilmuwan hukum Eropa. Hasil analisa data tersebut yang menjadi cikal bakal pembentukan hukum bagi negara-negara Eropa jajahan Perancis termasuk Belanda. Oleh sebab itu, Belanda mengadopsi hukum negara Perancis yang kini disebut sebagai hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).

Hukum Eropa Kontinental merupakan hukum yang berkembang di daratan Eropa. Ketika itu negara-negara Eropa mempunyai misi *three G*, yaitu:

1. *Gold* sebagai pencari kekayaan di negeri jajahan,
2. *Gospel* sebagai penegak agama kristiani,

3. *Glory* sebagai pencari kekuasaan di negeri jajahan.

Alasan diatas menjadi tujuan negara barat untuk melakukan imperialisme terhadap berbagai negeri di belahan dunia. Oleh sebab itu, Belanda menjajah Indonesia sekaligus menerapkan hukum kolonialnya di Nusantara.

Pada masa kolonialisme, Nusantara masih berupa pecahan-pecahan wilayah yang dipegang oleh berbagai kerajaan. Sumber hukum yang berlaku di kerajaan Nusantara, yaitu hukum adat dan hukum agama. Namun, kedatangan Belanda menjadi kekalutan hidup bagi pemerintahan kerajaan. Sehingga terjadi berbagai pertempuran di tanah Nusantara yang dimenangkan oleh Belanda.

Akhirnya Belanda menguasai sebagian wilayah Nusantara melalui berbagai ekspansi sampai ke pelosok timur Nusantara. Kemenangan Belanda dalam berbagai pertempuran di tanah Nusantara, menjadikannya bebas dalam mengeksploitasi sumber daya wilayah-wilayah kekuasaannya. Selain eksploitasi, Belanda juga menerapkan hukum kolonial bagi setiap wilayah jajahannya. Akan tetapi, masyarakat Nusantara masih tetap berpegang teguh pada hukum adat dan agama. Alasan ini yang membuat Belanda berpikir keras dalam menegakkan imperialisme terhadap hukum bagi negeri jajahan.

Pada tahun 1893, Christian Snouck Hurgronje ditugaskan oleh Belanda untuk menyusun saran-saran penyelesaian perang antara pemerintah kolonial dan Aceh. Snouck melakukan analisa terhadap kehidupan masyarakat muslim di Aceh melalui pendekatan anthropologi. Setelah data berhasil terkumpul, Snouck mampu

menyelesaikan laporannya yang disebut dengan *Atjeh Verslag (de Atjeheers)*. Laporan ini menjadi dasar utama dalam kebijakan politik dan militer oleh pemerintah kolonial untuk menghadapi Aceh. Adapun intisari dari *Atjeh Verslag (de Atjeheers)*, yaitu:

1. Titik kelemahan Aceh ialah Ulama. Alasannya, ulama berperan penting dalam memegang pergerakan semangat juang rakyat Aceh. Sehingga pemerintah kolonial wajib memerangi para ulama Aceh,
2. Menghindari perundingan dengan kalangan ulama,
3. Pemerintah kolonial wajib merebut kembali Aceh Besar,
4. Mendukung sektor kehidupan rakyat Aceh seperti pertanian, perdagangan dan kerajinan sebagai strategi untuk mendapat simpati rakyat Aceh.⁴⁵

Hasil analisisnya menjadi teori yang memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan muslim saat itu, yang disebut sebagai teori *receptie*. Dalam tulisannya, Snouck menyatakan bahwa:

“In the law of Islam a small place is allotted to the adat, i. e. the different manners and customs of different places, but it does not admit of any special representatives of adat or systems of rules to carry it out. Where recourse is had to laws which are to a great extent based on adat or are called into being by human choice or agreement, this can, as we have seen, be only excused on the ground that the men and the conditions of the present time are too evil to be governed by the holy law.”⁴⁶

⁴⁵Lailatul Fitriyah, “Perang Aceh 1873-1903 (Surutnya Hubungan Diplomasi Kesultanan Aceh dan Turki ‘Utsmani)”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), (Online), h.39-40. Tersedia di: http://digilib.uinsby.ac.id/29194/3/Lailatul%20Fitriyah_A92215095.pdf (diakses pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 13:25 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁶C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese Vol. 1*, Terjemahan oleh A. W. S. O’sullivan (Den Haag: E. J. Brill Leyden, 1906), (Online), h.162. Tersedia di: <https://b->

Snouck menyatakan dalam teorinya bahwa hukum Islam bisa menjadi sumber utama dalam kehidupan masyarakat setelah diresepsi oleh hukum adat setempat.⁴⁷ Alasannya, Snouck menganggap bahwa ajaran Islam menjadi sumber pendukung untuk menciptakan kebiasaan masyarakat. Sehingga diperlukan pemilahan terhadap nilai-nilai Islam yang tepat sesuai kebiasaan setempat. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi rakyat Aceh berdasarkan hukum adat.

Teori *receptie* bertujuan untuk mengaburkan akidah umat Islam. Padahal suatu tradisi (*urf*) bisa dilaksanakan, apabila tidak bertentangan dengan ajaran syari'ah.⁴⁸ Sehingga teori *receptie* berhasil memecah-belah umat muslim. Hal ini terlihat dari kekalutan hidup masyarakat yang semakin melemahkan semangat juang dan kepercayaan terhadap kesultanan Aceh. Oleh sebab itu, Belanda memenangkan wilayah Aceh melalui politik adu domba yang dirancang oleh Snouck.

Setelah lama Imperialisme berkuasa, rakyat Nusantara berkumpul untuk mempersatukan kekuatan dalam merebut kemerdekaan kembali melalui Hari

ok.cc/book/3283985/49d4de (diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 09:25 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁷Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia". *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 4, (Juli 2012), (Online), h.452. Tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/57450/kedudukan-hukum-islam-dalam-negara-republik-indonesia> (diakses pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 15:15 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁸Agus Hermanto, "Tradisi sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma *Ahli Sunnah wal Jama'ah*).". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), (Online), h.189. Tersedia di: <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/80/127> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 14:30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peringatan tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puncak terjadinya kemerdekaan setelah dibentuknya organisasi BPUPKI dan PPKI oleh pemerintah Jepang. Alasannya, pembentukan organisasi ini menjadi kesempatan utama yang dimanfaatkan oleh kaum pemuda untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kemerdekaan Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kemudian Indonesia menjadi sebuah negara baru yang belum mempunyai payung hukum. Sejak masa Orde Lama, pemerintah telah memberi perhatiannya untuk mengubah hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Akan tetapi, harapan tersebut masih belum terwujud hingga saat ini. Menurut Satya Arinanto, pemerintah lambat dalam melakukan reformasi produk hukum kolonial menjadi hukum nasional.⁴⁹ Alasannya, ada kesulitan dalam proses memahami karakter bangsa yang multikultural dan transliterasi kebahasaan Belanda. Sehingga sulit menemukan titik terang dalam penyusunan materi hukum tersebut.

Akibat perbedaan diatas, membuat *founding fathers* menghentikan proses penyusunan hukum nasional. Namun, penghentian proses tersebut menghasilkan kesepakatan dengan menerapkan sistem hukum nasional berdasar pada masa pra-

⁴⁹Maroni, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional sebagai Politik Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, (Januari 2012), (Online), h.86. Tersedia di: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/199/147> (diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 14:25 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

kemerdekaan Indonesia, yaitu masa kolonial dan kerajaan Nusantara. Alhasil, ini yang menjadi latar belakang berlakunya tiga sistem hukum nasional, yakni:

1. Sistem Hukum Kolonial Belanda (Civil Law)

Sistem hukum kolonial ini dikenal dengan nama sistem hukum Eropa Kontinental, yang berkembang di daratan benua Eropa terkadang disebut sebagai *Civil Law*. Prinsip sistem hukum *Civil Law* ialah kekuatan hukum dikatakan mengikat, dikarenakan adanya peraturan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi undang-undang. Adapun ciri-ciri dari *Civil Law*, antara lain:

- a. Mengakui adanya sistem kodifikasi hukum,
- b. Mengakui perbedaan antara hukum privat (hukum perdata dan dagang) dan hukum publik (hukum pidana, administrasi negara dan tata negara),
- c. Yurisprudensi hakim terdahulu tidak mengikat,
- d. Rujukan utama hakim ialah undang-undang.

2. Sistem Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan tidak tertulis. Hukum adat bersifat tradisional yang bersumber dari kehendak nenek moyang secara turun-temurun.⁵⁰ Sehingga apa yang menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu, akan dibenarkan oleh

⁵⁰Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Lampung, 2017), h.24.

masyarakat setempat. Umumnya kebiasaan tersebut dipandu oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai pemuka adat. Eksistensi hukum adat ini berdasarkan pada masing-masing daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mempertahankan ciri khas daerah tersebut.

3. Sistem Hukum Islam

Hukum agama yang berlaku di Indonesia ialah hukum Islam. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat penting. Menurut Prof. Hazairin, negara wajib menjalankan syariat bagi setiap pemeluk agama di Indonesia dan tidak boleh berlaku umum yang bertentangan dalam kaidah-kaidah agama tersebut.⁵¹ Hukum Islam di Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut⁵²:

- a. Memiliki kepribadian Arab yang terbungkus dalam penerapan Madzhab Syafi'iyah,
- b. Menitikberatkan dalam hukum privat yang terwujud melalui lembaga Peradilan Agama terkait persoalan nikah, talak, wakaf, hibah dan lainnya,

⁵¹*Ibid.*, h.28-29.

⁵²Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, (Desember 2016), (Online), h.167-170. Tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/222635/eksistensi-hukum-adat-dalam-kompilasi-hukum-islam-indonesia-khi> (diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 14:35 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Pemberlakuan hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari hukum negara, alasan ini terwujud dalam pembuatan kebijakan-kebijakan hukum secara khusus oleh negara seperti adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, ketiga sistem hukum diatas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum dibuat untuk memberantas berbagai persoalan publik dan private. Hukum yang mengatur terkait persoalan masyarakat luas dinamakan sebagai hukum publik, seperti HAM, organisasi masyarakat dan sebagainya. Sedangkan hukum yang terkait dengan persoalan hak dan kewajiban individu dinamakan sebagai hukum private, seperti pernikahan, perceraian dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi dasar betapa pentingnya keberlakuan hukum di Indonesia.

Dewasa ini, pergerakan organisasi masyarakat kian merajalela terutama pada kelompok Islamisme. Hal ini tampak pada pergerakannya yang sering menggunakan kekerasan ketika memberantas kemunkaran. Alasannya, kekerasan dinilai lebih efektif dalam menuntaskan persoalan-persoalan munkar dan maksiat di masyarakat.

Persoalan organisasi masyarakat yang notabenenya ialah kelompok Islamisme, sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Masyarakat. Namun, aturan tersebut telah direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Lahirnya revisi terhadap UU sebelumnya, dikarenakan adanya praktik dakwah terkait organisasi masyarakat Hizbuth Thahrir Indonesia (HTI) yang ingin mengubah Pancasila menjadi sistem khilafah. Karena aturan sebelumnya, tidak mengatur tentang ideologi organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga terjadi pembaharuan terhadap butir-butir substansinya.

Adapun materi hukum yang mengatur praktik organisasi masyarakat di lapangan, yaitu Pasal 59 Ayat 3 Huruf d. Butir ini menegaskan bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Materi ini membatasi gerak organisasi masyarakat agar tidak bertindak sewenang-wenang atau main hakim sendiri berupa aksi *sweeping*.

Apabila masih ada organisasi masyarakat yang melampaui ketentuan tersebut, maka ada konsekuensinya. Konsekuensi tersebut dipertegas dalam Pasal 60 Ayat 2, menegaskan bahwa ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, dalam salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), (Online), h.9. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017> (diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 17:00 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

administratif dan/atau sanksi pidana.⁵⁴ Kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 61 Ayat 3 bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat 2 berupa:

1. Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Oleh Menteri, Atau
2. Pencabutan Status Badan Hukum Oleh Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan bukanlah pada kelompok, melainkan pada orang yang terbukti melakukan tindak kekerasan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 170 Ayat 1 bahwa barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.⁵⁶ Menurut Hazewinkel-Suringa, melawan hukum artinya melakukan perbuatan tanpa hak sendiri dan bertentangan dengan hukum objektif. Jonkers dan Utrecht memandang suatu perbuatan dikatakan sebagai delik, apabila:

1. Perbuatan tersebut diancam pidana,
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum,
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersalah,

⁵⁴*Ibid.*, h.10.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Pustaka Mahardika, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h.61.

4. Orang yang bersalah tersebut dianggap mampu bertanggung jawab.⁵⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari pandangan nonyuridis, dengan mengedepankan aspek yuridis.⁵⁸ Alasannya, hukum digunakan sebagai keharusan untuk mengatur tingkah laku manusia. Pemahaman Kelsen sejalan dengan pendapat Prof. Donald Black yang merumuskan, apabila pemerintah tidak melakukan pengendalian sosial yang seharusnya, ini dinamakan sebagai hukum tidak berjalan yang berpotensi melahirkan tindakan main hakim sendiri oleh rakyat.⁵⁹ Tindakan tersebut sebagai wujud daripada pengendalian sosial akibat ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, perlu penegakkan hukum yang seharusnya (*das sollen*) oleh pemerintah agar rakyat tidak bertindak dengan caranya sendiri yang mencederai kehidupan demokrasi di Indonesia.

⁵⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ed 2) (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.88.

⁵⁸Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.109.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, h.59.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Banna, Hasan. *Majmu'ah Rasa'il Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna*. Translated by Rofi' Munawar, dan Wahid Ahmadi Anis Matta. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2018.

—. *Majmu'ah Rasa'il Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna Edisi 2th*. Translated by Rofi' Munawar, dan Wahid Ahmadi Anis Matta. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2018.

Ali, Mahrus. *Melampaui Positivisme Hukum Negara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asy-Syafi'i, Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fanani. *Fathul Mu'in*. Translated by Aliy As'ad Edisi 3th. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Black, Donald. *Moral Time*. New York: Oxford University Press, 2011.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Dkk, Noorhaidi Hasan. *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.

Firdawaty, Linda. *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Lampung, 2017.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi 2th*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Hulayyil, Fawwaz bin. *Usus Manhaj as-Salaf fi ad-Da'wah Ilallah*. Translated by Beni Sarbeni. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jilid I*. Indonesia: Prenadamedia Group, 2014.
- Jawas, Yazid bin Abd Qadir. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Depok: Khazanah Fawa'id, 2017.
- Jones, Sidney. *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*. Edited by Husni Mubarak dan Irsyad Rafsadi. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2015.
- Karim, Khalil Abdul. *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketiga*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd al-Karim*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Ke-X*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- . *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke-V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pamekasan, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI). *Mengenal Gerbangsalam*. Pamekasan: LP2SI, 2002.

- Panggabean, Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal. *Demokrasi dan Kekecewaan*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Translated by Jasiman, Khozin Abu Faqih, dan Kamal Fauzi Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Quthb, Sayyid. *Fiqhud-Da'wah: Maudhu'at fi ad-Da'wah wal Harakah*. Translated by Abdul Majid Edisi III. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- . *Ma'alim fi Ath-Thariq*. Translated by Mahmud Harun Muchtarom. Yogyakarta: Darul Uswah, 2009.
- Rosadi, Andri. *Hitam Putih Front Pembela Islam: Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*. Jakarta: Nun Publisher, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa' Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Shidarta, Arief. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syihab, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein. *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008.
- Tambunan, Elia. *Islamisme Satu Plot dari Mesir, Pakistan dan Indonesia*. Banten: Arashi Group, 2019.

Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wagianto. *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah: Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful Islam, 2007.

—. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

—. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Jurnal, E-Book, Internet

Abdullah, Anzar. "Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis." *Jurnal Addin*. (<https://media.neliti.com/media/publications/177446-ID-none.pdf>) vol. 10, no. 01, (Februari 2016).

Adiwilaga, Rendy. "Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakkan Islamisme di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik*. (<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11373>) vol. 02, no. 01, (Maret 2017).

Alymansur. *Sejarah Perang Uhud Singkat dan Lengkap*. <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html> (accessed Agustus 30, 2019).

Antara. *LPI Pamekasan Akui Kesalahan Sweeping, Penahanan Pelaku Ditunda*. <https://tirto.id/lpi-pamekasan-akui-kesalahan-sweeping-penahanan-pelaku-ditunda-cDSr> (accessed Desember 2018, 2018).

—. *Setara: Aksi Sweeping LPI-FPI di Pamekasan Harus Diproses Hukum*. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/setara-aksi-sweeping-lpi-fpi->

di-pamekasan-harus-diproses-hukum-cDEL (accessed Desember 14, 2018).

Arafat, Alaa Al-Din. *Egypt in Crisis The Fall of Islamism and Prospects of Democratization*. <http://185.39.10.101/ads.php?md5=4E1C91FB5D52B6D0CC880CBBC8BD61BE>. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.

—. *The Rise of Islamism in Egypt*. <http://185.39.10.101/ads.php?md5=F7BFB135B96B3AF3EFFF2D0C037CA5E4>. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017.

Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan Maqashid al-Din." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/57416/gerakan-islam-jamaah-tabligh-dalam-tinjauan-maqashid-al-din>) vol. X, no. 03, (Januari 2012).

Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/56595/pemberlakuan-teori-teori-hukum-islam-di-indonesia>) vol. X, no. 04, (Juli 2012).

Calvert, John. *Sayyid Quthb and The Origins of Radical Islamism*. http://93.174.95.29/_ads/73D42A25AA6AA8D280A96DFD69F33326. New York: Oxford University Press, 2013.

Cole, Juan. *Napoleon's Egypt Invading the Middle East*. <http://185.39.10.101/ads.php?md5=1A5A0245E73F6AF62E451C1F389257D8>. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Dharma, Silviana. *Historipedia: Magna Charta Lahir dari Perseteruan Antara Raja John, Paus dan Baron*. <https://elearn.id/blog/mengintip-sejarah-demokrasi-di-dunia/> (accessed September 07, 2019).

Elearn. *Mengintip Sejarah Demokrasi di Dunia*. <https://elearn.id/blog/mengintip-sejarah-demokrasi-di-dunia/> (accessed Oktober 18, 2019).

Fahmi, Agus. "Nilai-Nilai Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Repository*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2018. <http://repository.umj.ac.id/bitstream/123456789/340/1/Agus%20Fahmi%20Full%20Text.pdf> (accessed Juni 30, 2019).

- Fathaturrohmah, Aidah. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Sya'rawi)." *Repository*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018. (accessed April 30, 2019).
- Fathoni, Rifai Shodiq. *Sejarah Demokrasi*. <https://elearn.id/blog/mengintip-sejarah-demokrasi-di-dunia/> (accessed Agustus 17, 2019).
- Fitriyah, Lailatul. "Perang Aceh 1873-1903 (Surutnya Hubungan Diplomasi Kesultanan Aceh dan Turki 'Utsmani)." *Digilib*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019. http://digilib.uinsby.ac.id/29194/3/Lailatul%20Fitriyah_A92215095.pdf (accessed Juli 27, 2019).
- Gumilang, Prima. *Sweeping Laskar FPI dan Perlawanan Balik Warga Pamekasan*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180122065509-20-270593/sweeping-laskar-fpi-dan-perlawanan-balik-warga-pamekasan> (accessed Desember 14, 2018).
- Gumilang, Radifan. *Gerebek Prostitusi dan Bawa Pergi 2 Wanita Diduga PSK, Mobil Ormas Pamekasan Langsung Dirusak Warga*. <https://www.google.com/amp/video.tribunnews.com/amp/view/42896/gerebek-prostitusi-dan-bawa-pergi-2-wanita-psk-mobil-ormas-pamekasan-langsung-dirusak-warga> (accessed Desember 14, 2018).
- Hayden, Lawrence Meir Friedman and Grant M. *American Law an Introduction 3th Edition*. <http://185.39.10.101/ads.php?md5=C40A059855F926A800AA6F61530CF4E>. New York: Oxford University Press, 2017.
- Hermanto, Agus. "Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Jurnal Al-'Adalah* (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2414/2394>) vol. 14, no. 02, (2017).
- . "Tradisi sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah wal Jama'ah)." *Jurnal Mahkamah* (<https://journal.iaimnu-metrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/80/127>) vol. 02, no. 01, (Juni 2017).

Hurgronje, C. Snouck. *The Achehnese vol. I*. Translated by A.W.S. O'sullivan. <https://b-ok.cc/book/3283985/49d4de>. Den Haag: E.J. Brill Leyden, 1906.

Hussain, Ghaffar. *A Brief History of Islamism*. <http://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/brief-history-of-islamism.pdf>. London: Quilliam, 2010.

Ingram, Haroro J. *The Charismatic Leadership Phenomenon in Radical and Militant Islamism*. <https://b-ok.cc/book/2709253/a22a89>. Farnham: Ashgate, 2013.

Irwantoni. "Peranan Siyasah Syar'iyyah dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/57512/peranan-siyasah-syariyyah-dalam-memahami-nas-nas-agama>) vol. X, no. 03, (Januari 2012).

Jamal, Misbahuddin. "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Ulum*. (<https://media.neliti.com/media/publications/184357-ID-konsep-al-islam-dalam-al-quran.pdf>) vol. 11, no. 02, (2011).

John L. Esposito, Lily Zubaidah Rahim, dan Naser Ghobadzadeh. *the Politica of Islamism Diverging Visions and Trajectories*. <http://185.39.10.101/ads.php?md5=922D8F2834FDCEBAACE1326911332C9D>. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.

John L. Esposito, Tamara Sonn, and John O. Voll. *Islam and Democracy after the Arab Spring*. <https://b-ok.cc/book/2554455/936cac>. New York: Oxford University Press, 2016.

Jurdi, Syarifuddin. "Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi." *Jurnal Politik Profetik*. (<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/1615/1567>) vol. 01, no. 01, (2013).

Keskin, Fethi Mansouri and Zuleyha. *Contesting The Theological Foundations of Islamism and Violent Extremism*. http://93.174.95.29/_ads/1FE0B7102EFDBB93E5D5C5557BD80353. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.

Kristanti, Elin Yunita. *6-10-1981: Presiden Mesir Anwar Sadat Diberondong Peluru*. <http://www.goole.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2114381/6-10->

1981-presiden-mesir-anwar-sadat-diberondong-peluru (accessed Juni 23, 2019).

Leonid Grinin, Andrey Korotayev, and Arno Tausch. *Islamism, Arab Spring, and The Future of Democracy: World Values Perspectives*. <https://b-ok.cc/book/3661267/46dbfe>. Switzerland: Springer, 2019.

Mahmudah, Siti. "Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Aqlam*. (<https://media.neliti.com/media/publications/240910-islamisme-kemunculan-dan-perkembangannya-15eca785.pdf>) vol. 03, no. 01, (Juni 2018).

—. "Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil 'Abd al-Karim." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/57306/reformasi-syariat-islam-kritik-pemikiran-khalil-abd-al-karim>) vol. XIII, no. 01, (Juni 2016).

Makhfudz, M. "Demokrasi di Era Reformasi." *Jurnal Al-'Adalah*. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8725/4696>) vol. 02, no. 8b, (2018).

Maroni. "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional sebagai Politik Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*. (<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/199/147>) vol. 12, no. 01, (Januari 2012).

Marwan. *Sejarah Demokrasi di Dunia dan di Indonesia*. <https://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/sejarah-demokrasi/amp> (accessed Agustus 20, 2019).

McManaman, Linus J. "Social Engineering: the Legal Philosophy of Roscoe Pound." *Journal of St. John's Law Review*. (<https://pdfs.semanticscholar.org/ffb0/7326b64202ee7cdbe7140bc40a3d9d168f6e.pdf>) vol. 33, no. 01, (May 2013).

Mudzakir. "Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/57682/hukum-islam-di-indonesia-dalam-perspektif-konstruksi-sosial-peter-l-berger>) vol. XII, no. 01, (Juni 2014).

- Muslim, Muhammad Nur Ichwan. *Syura dalam Pandangan Islam dan Demokrasi*. <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html> (accessed Agustus 29, 2019).
- Pardjaman, Rahmawati. "Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/57339/transformasi-nilai-nilai-syariah-ke-dalam-sistem-hukum-nasional-sebuah-pendekata>) vol. X, no. 02, (Juli 2013).
- Rahmatika. *Sweeping di Pesta Ulang Tahun Bocah Pamekasan, Tujuan Hidup Laskar FPI Apa sih?* <https://seword.com/umum/sweeping-di-pesta-ulang-tahun-bocah-pamekasan-tujuan-hidup-laskar-fpi-apa-sih-r1qo2WQHM> (accessed Desember 14, 2018).
- Rauf, Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman. "Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah*. (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/57501-ID-none.pdf&ved=2ahUKEwiU2raZnOTkAhWbfH0KHZgWDkcQFjABegQIBxAC&usg=AOvVaw174UqRdjYmRRtzZ_vLycaZ) vol. XII, no. 03, (Juni 2015).
- Rosadi, Nasrullah dan Aden. "Kritik Hukum Islam atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/272046/kritik-hukum-islam-atas-sanksi-pidana-pelaku-prostitusi-dalam-peraturan-daerah>) vol. 14, no. 01, (2017).
- Shavit, Uriya. *Islamism and the West From Cultural Attack to Missionary Migrant*. http://93.174.95.29/_ads/CFDD57384BB4AB5F292E799382B63478. New York: Routledge, 2014.
- Sodiqin, Ali. "Genealogi Gerakan Penegakkan Syari'at Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Muzahib*. (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1378/1199>) vol. 03, no. 01, (Juni 2015).
- Sukayat, Tata. "Radikalisme Islam atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah*. (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/1886/1995>) vol. 121, no. 01, (2018).
- Suleman, Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain. "Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.>

neliti.com/publications/222635/eksistensi-hukum-adat-dalam-kompilasi-hukum-islam-indonesia-khi) vol. XIII, no. 02, (Desember 2016).

Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/57450/kedudukan-hukum-islam-dalam-negara-republik-indonesia>) vol. X, no. 04, (Juli 2012).

Suwirta, Andi. "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974." *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*. (<http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/13949/8089>) vol. 03, no. 02, (September 2018).

Tribunnews. *Bukan Karena Dicegah, Ini yang Membuat Habib Rizieq Tak Bisa Pulang ke Indonesia Menurut Pakar*. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/07/17/bukan-karena-dicegah-ini-yang-membuat-habib-rizieq-tak-bisa-pulang-ke-indonesia-menurut-pakar?page=3> (accessed Agustus 29, 2019).

Tualeka, Eko Purwono dan M. Wahid Nur. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb." *Jurnal Al-Hikmah*. (<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/download/1053/pdf>) vol. 01, no. 02, (2015).

Wikipedia. *Orde Baru*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru (accessed Agustus 18, 2019).

Yubsir. "Maqashid Al-Syari'ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah*. (<https://www.neliti.com/publications/58116/maqashid-al-syariah-sebagai-metode-interpretasi-teks-hukum-telaah-filsafat-hukum>) vol. XI, no. 02, (Juli 2013).

Yunus, Moch. "Konsepsi Politik Islam Klasik." *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. (<https://media.neliti.com/media/publications/223771-konsepsi-politik-islam-klasik-suksesi-ke.pdf>) vol. 05, no. 02, (November 2016).

Zulkarnain, Kusnadi dan Zulhilmi. "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message of the Qur'an." *Jurnal Wardah* (<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/1777/1458>) vol. 18, no. 02 (2017).

Kamus dan Peraturan Hukum

Alouisci, Von Edison. "Naskah Piagam Madinah." 2012. <https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/03/piagam-madinah.pdf> (accessed Oktober 29, 2019).

Mahardika, Pustaka. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran. http://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=805. (accessed Februari 11, 2019).

Pustaka, Redaksi Tangga. *UUD 45 & Perubahannya*. Jakarta: Redaksi Tangga Pustaka, 2009.

Retnoningsih, Suharso dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2017.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, dalam salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017> (accessed Januari 03, 2019).